

2023



LAPORAN KINERJA

**PEMERINTAH
KOTA MALANG**



PEMERINTAH KOTA MALANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Gajahmada Nomor 2A Malang telp.(0341) 364450 – 321276

Kode Pos 65119

Malang, 5 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/188/35.73.300/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan (LKjIP) Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Malang Tahun 2023

Kepada
Yth. Pj. Walikota Malang
di

MALANG

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu dan Evaluasi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan juga berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota Malang telah melaksanakan evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa catatan antara lain:

1. Berdasarkan pengujian atas keberadaan dokumen Laporan Kinerja, 28 (Dua Puluh Delapan) PD telah menyusun, mengesahkan, dan menyampaikan Laporan Kinerja dengan tepat waktu sesuai jadwal. Hal tersebut sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Berdasarkan pengujian atas Kualitas Informasi Kinerja, dokumen Laporan Kinerja secara umum telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, namun terdapat catatan untuk 17 (Tujuh belas) PD antara lain:
 - a. Untuk sistematika penulisan terdapat catatan sebagai berikut :
 - 1) Beberapa dokumen Laporan Kinerja PD belum dilengkapi dengan Daftar Isi dan Daftar Lampiran untuk mempermudah pencarian data pada dokumen LKJIP;
 - 2) Beberapa PD belum melampirkan data dukung seperti Matriks Renstra, Perjanjian Kinerja, Ringkasan Pengukuran Kinerja/Rekap data pengukuran yang sesuai IKU, maupun lampiran lain yang mendukung isi LKjIP;
 - 3) Beberapa PD belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rencana Tindak Lanjut dan upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya);

- 4) Beberapa dokumen Laporan Kinerja PD belum memuat pembandingan lain yang diperlukan (SPM maupun *benchmarking* kinerja);
 - 5) Untuk target yang belum berhasil dicapai, beberapa PD belum menyajikan analisa lebih dalam mengenai penyebab atau kegiatan/aktivitas/proses yang menyebabkan kurang maksimalnya capaian.
- b. Penulisan target antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja), Perjanjian Kinerja dengan dokumen LKJIP pada beberapa PD belum sepenuhnya konsisten, sehingga penghitungan dan analisa capaian kinerja kurang valid;
 - c. Perhitungan capaian kinerja pada beberapa PD belum sepenuhnya sesuai dengan formulasi perhitungan berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.402/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.402/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023;
3. Berdasarkan Pengujian atas Pemanfaatan Informasi Kinerja, informasi kinerja yang disajikan dalam dokumen Laporan Kinerja telah dimanfaatkan oleh 28 (Dua Puluh Delapan) PD untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program (kegiatan) organisasi, namun tetap diperlukan adanya pengembangan inovasi untuk mendukung program dan kegiatan pada PD tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu penekanan tugas dan langkah perbaikan untuk mengoptimalkan efektifitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang, agar di kemudian hari kualitas pelaporan semakin baik.

Demikian untuk menjadikan periksa dan arahannya.



Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang

Ringkasan

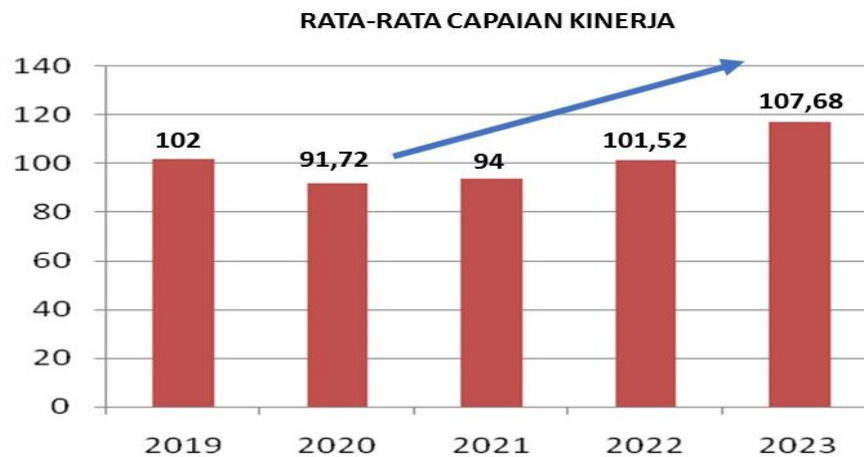
Eksekutif

Tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien merupakan refleksi dari usaha reformasi birokrasi yang dikelola dengan baik. Demikian halnya dengan Pemerintah Kota Malang selaku penyelenggara negara dan pemerintahan yang bercita-cita mensejahterakan masyarakat serta berupaya dengan berbagai kebijakan dan program yang secara operasional bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk kinerja yang prima.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 masuk dalam kategori “BERHASIL”, karena rata-rata capaiannya adalah 107,68% dari target. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Kota Malang mulai bangkit kembali pada berbagai sektor, terutama dalam penurunan angka kemiskinan, yang ditunjukkan oleh penurunan angka PMKS. Penurunan angka PMKS tersebut dibarengi oleh menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Hal ini merupakan hasil dari inovasi Pemerintah Kota Malang dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Walaupun demikian, masih terdapat indikator yang tidak berhasil mencapai di antaranya adalah Pertumbuhan Ekonomi Kreatif. Selain itu, indikator yang masih kurang maksimal pencapaiannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) dan Indeks Kematangan SPBE. Untuk itu diperlukan analisa mendalam terkait capaian pertumbuhan ekonomi kreatif karena besarnya tantangan yang dihadapi oleh pegiat ekonomi kreatif, baik dalam hal peningkatan pengelolaan usaha maupun banyaknya produk luar negeri sejenis yang masuk. Terkait capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, diperlukan analisa mendalam terkait upaya peningkatan kualitas air dan kualitas lahan yang melibatkan kerja sama Pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan indikator lain, yaitu Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), Indeks pembangunan Gender (IPG), dan Nilai SAKIP walaupun capaiannya masih kurang maksimal, namun capaiannya sudah di atas 90%.



Capaian Kinerja Pemerintah Kota Malang tahun 2023 mendapat perhatian lebih karena tahun 2023 merupakan tahun akhir dalam periodisasi RPJMD 2018-2023. Apabila dilihat dari capaian pertahun, capaian kinerja Pemerintah Kota Malang mengalami fluktuasi saat terdampak pandemi covid-19 pada tahun 2020. Namun demikian, capaian kinerja Kota Malang berangsur-angsur meningkat sampai tahun 2023 sebesar 107,68%.



Untuk mendukung capaian kinerja tahun berikutnya, Pemerintah Kota Malang telah melakukan reviu prioritas pembangunan, penekanan strategi pada isu-isu strategis Kota Malang maupun target kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah selanjutnya.



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Walikota untuk menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *clean government* yaitu pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah, maka Laporan Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dengan demikian, informasi laporan kinerja juga disampaikan dalam LPPD.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif, dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran untuk pembiayaan daerah.

1. Visi

Berdasarkan kondisi, peluang, tantangan, dan isu strategis Kota Malang yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat Visi Kota Malang Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang 2018-2023, sebagai berikut:

KOTA MALANG BERMARTABAT

Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang

dipimpin. Istilah “Martabat” menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi “Kota Malang BERMARTABAT” diharapkan dapat terwujud suatu kondisi tatanan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladatul thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, di mana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religius yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Dengan demikian, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga;
2. Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan, dan keterpaduan;
3. Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender; dan
4. Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel.

5. Tujuan dan Sasaran

Target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,20
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,30
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ Purchasing Power Parity	85,20
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,45%
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,50
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,63
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5,00%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,24%
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,900
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,20

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%
	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	84,9
		Opini BPK;	WTP
		Maturitas SPIP	3,200
		Rasio PAD.	0,33
	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	77,1
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,54	

Tabel 2
Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Kota Malang

Misi 1			Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga						
Tujuan 1			Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya						
No	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77	78,00	79,00	77,00	77,10	77,20	77,20
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	81,4	81,40	81,60	81,80	82,10	82,30	82,30
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>	84,6	84,70	84,80	85,00	85,10	85,20	85,20



Misi 2			Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan, dan keterpaduan						
Tujuan 2			Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan						
No	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	N/A	6	6,10	6,20	6,30	6,45	6,45
2	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,50
3	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,15	82,92	83,69	67,57	67,60	67,63	67,63
Misi 3			Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender						
Tujuan 3			Terwujudnya kesejahteraan dan kerukuknan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender						
No	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	2,23	5	5	5	5	5	5
		Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A	-	-	8,20	7,50	6,24	6,24
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,836	0,852	0,868	0,884	0,900	0,900
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	94,71	96,80	96,90	97,00	97,10	97,20	97,20
Misi 4			Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel						
Tujuan 4			Terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel						

No	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21%	25%	40%	60%	82%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	70,96	75,65	80,50	82,05	83,50	84,90	84,90
		Opini BPK;	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	3,045	3,500	4,000	3,100	3,150	3,200	3,200
		Rasio PAD.	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33	0,33
3	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	64,00	71,46	72,92	74,38	75,84	77,10	77,10
4	Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,44	3,80	4,09	4,21	4,45	4,54	4,54

Sumber: P-RPJMD Kota Malang 2018-2023

B. Indikator Kinerja Utama Tujuan

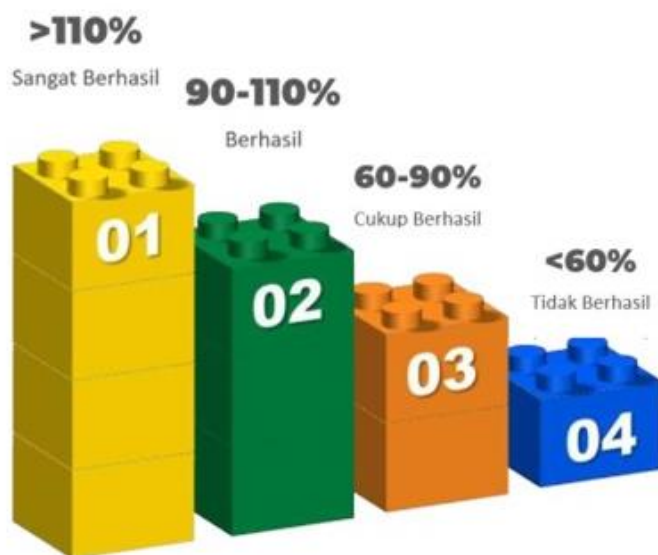
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023. Terdapat 6 (enam) indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian tujuan pembangunan meliputi: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Pertumbuhan Ekonomi, (3) Gini Ratio, (4) Angka Kemiskinan, (5) Indeks Modal Sosial, dan (6) Indeks Reformasi Birokrasi.

C. Parameter keberhasilan / kegagalan

Terdapat tiga aspek keberhasilan/kegagalan kinerja yang digunakan sebagai cara pengukuran, yaitu capaian kinerja, anggaran,

dan sumber daya, yang mana parameter penentuan tingkat keberhasilan/keberhasilannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	SKOR	LEVEL CAPAIAN KINERJA
1	< 60%	Tidak Berhasil
2	60-90%	Cukup Berhasil
3	90-110%	Berhasil
4	> 110%	Sangat Berhasil



Grafik 1. Grafik Parameter Capaian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian tahun 2023, terhadap capaian tahun sebelumnya dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya **107,68%** dari target. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Kota Malang mulai bangkit kembali pada berbagai sektor, terutama dalam penurunan angka kemiskinan, yang ditunjukkan oleh penurunan angka PMKS. Penurunan angka PMKS tersebut dibarengi oleh menurunnya angka kemiskinan. Hal ini merupakan hasil dari inovasi Pemerintah Kota Malang dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Walaupun demikian, masih terdapat indikator yang belum berhasil tercapai dengan optimal diantaranya adalah Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) dan Indeks Kematangan SPBE. Sedangkan indikator lain, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), Indeks pembangunan Gender (IPG), dan Nilai SAKIP walaupun capaiannya masih kurang maksimal, namun capaiannya sudah di atas 90%.

a. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Pengukuran Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Visi	Kota Malang Bermartabat				
MISI 1	Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Dasar lainnya Bagi Semua Warga				
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,20	80	103,63%
	Meningkatnya kualitas layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	82,30	85	103,28%
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ Purchasing Power Parity	85,20	87	102,11%
MISI 2	Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan, dan keterpaduan				
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,45%	4,63%*	71,78%
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,50	4,51	100,22%
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,63	59,92	88,60%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
MISI 3	Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berdasarkan keberagaman dan keperpihkan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender				
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5,00%	13,75%	275%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,24%	6,80%	91,03%
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,900	0,8488	94,31%
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,20	95,54*	98,29%
MISI 4	Memastikan Kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel				
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	84,90	81,8	96,35%
		Opini BPK;	WTP	WTP	100%
		Maturitas SPIP	3,200	3,326	103,94%
		Rasio PAD	0,33	0,34	103,03%
	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	77,10	88,51	114,80%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,54	3,82	84,14%	

Capaian kinerja sasaran strategis sebagian besar sudah mencapai target dan ada yang melebihi target. Akan tetapi masih ada kinerja yang belum dapat berhasil mencapai target yaitu pada sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi Kreatif. Selain itu, indikator yang masih kurang maksimal pencapaiannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) dan Indeks Kematangan SPBE. Sedangkan indikator lain, yaitu Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), Indeks pembangunan Gender (IPG), dan Nilai SAKIP walaupun capaiannya masih kurang maksimal, namun capaiannya sudah di atas 90%.

b. Pengukuran realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir diperlukan untuk mengetahui peningkatan kinerja yang ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2018	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,00	77,1	77,20	79,41	80	103,00%	103,63%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	81,40	82,1	82,30	82,69	85	100,72%	103,28%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ Purchasing Power Parity	84,60	85,1	85,20	86,16	87	101,25%	102,11%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan	N/A	6,30%	6,45%	4,42%	4,63%	70,16%	71,78%



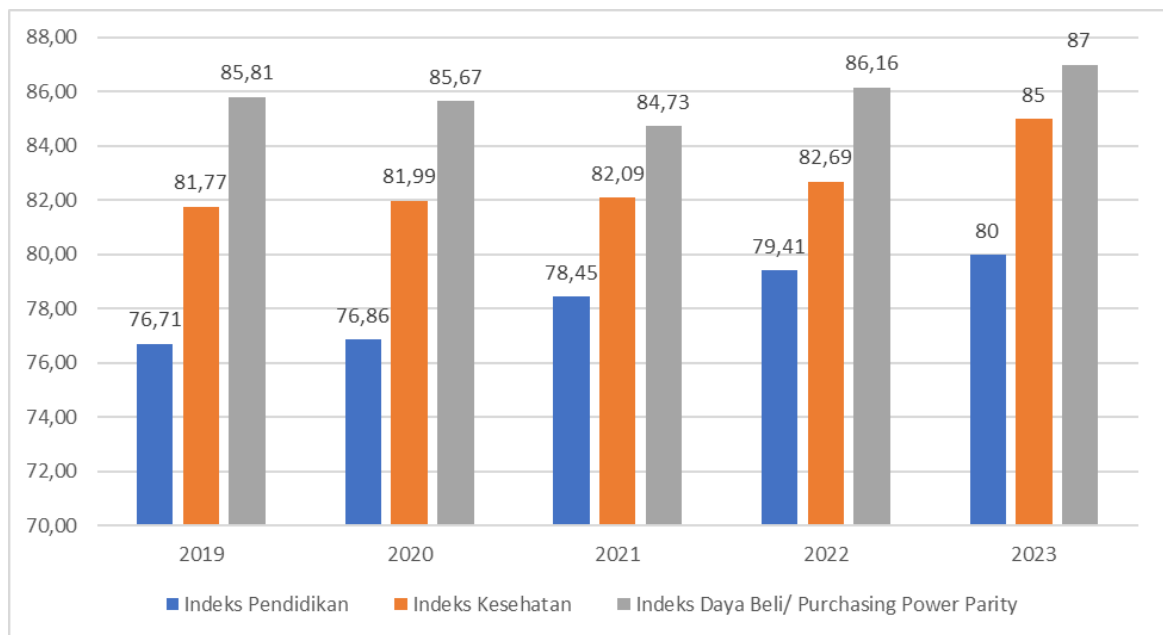
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2018	2022	2023	2022	2023	2022	2023
kreatif	an ekonomi kreatif							
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	3,75	4,35	4,50	4,36	4,51	100,23%	100,22%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	82,15	67,60	67,63	56,31	59,92	83,30%	88,60%
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	-2,23%	5,00%	5,00%	3,76%	13,75%	75,20%	275%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A	7,50%	6,24%	7,66%	6,80%	97,87%	91,03%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,884	0,900	0,8483	0,8488	95,96%	94,31%
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	95,25	97,10	97,20	95,54	95,54	98,4%	98,29%
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21%	82%	100%	100%	100%	122%	100%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	70,96	83,5	84,9	80,7	81,8	96,6%	96,35%
	Opini BPK;	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%
	Maturitas SPIP	3,18	3,150	3,200	3,634	3,326	115,4%	103,94%
	Rasio PAD.	0,22	0,30	0,33	0,34	0,34	113,3%	103,03%
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	64	75,84	77,1	76,32	88,51	100,6%	114,80%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2018	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,44	4,45	4,54	2,6	3,82	58,4%	84,14%

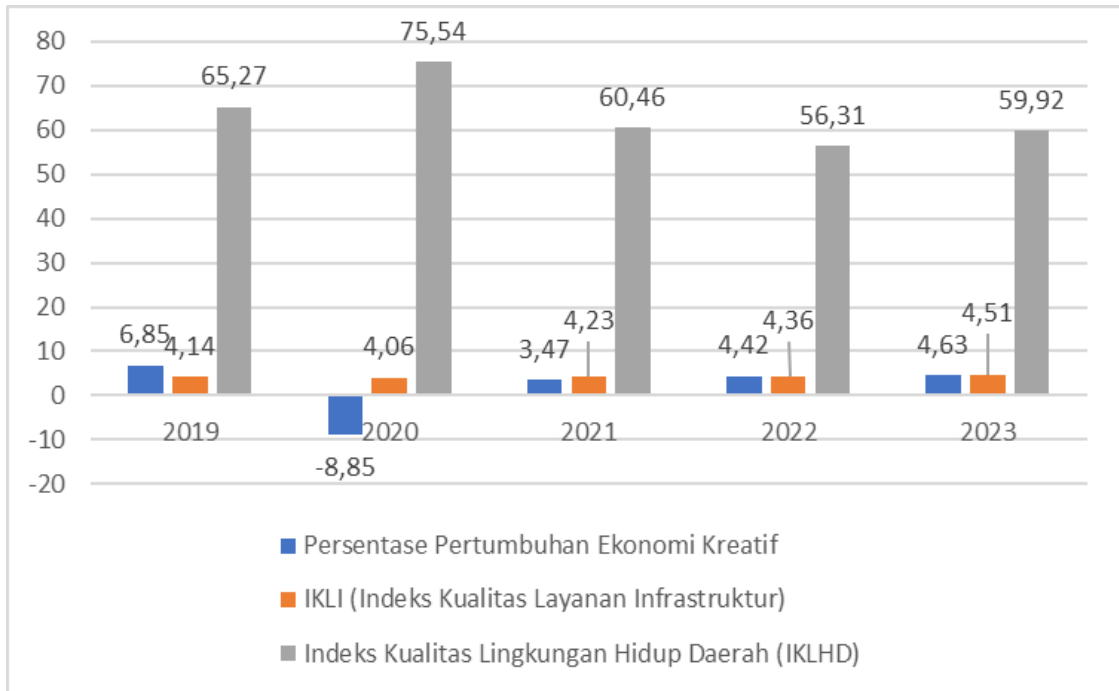
Sebagai informasi dalam perbaikan perencanaan berikutnya perlu gambaran progres kinerja selama periode RPJMD maka dibandingkan realisasi kinerja mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik 2. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2023



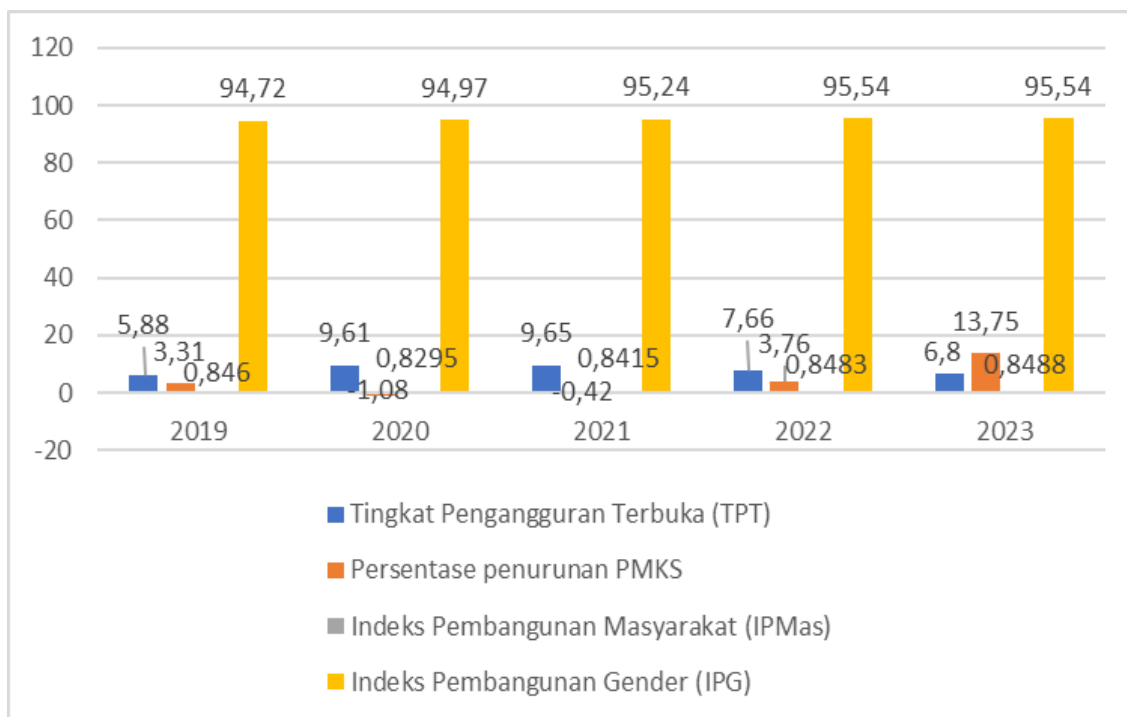
Dari grafik di atas, indikator sasaran meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter yaitu indeks pendidikan, indikator sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan yaitu indeks kesehatan, dan indikator sasaran meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan yaitu indeks daya beli meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kota Malang dalam rangka terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya telah berhasil.

Grafik 3. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2023



Dari grafik di atas, indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, yaitu persentase pertumbuhan ekonomi kreatif, Indikator sasaran meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu yaitu Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), dan indikator sasaran meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya.

Grafik 4. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2023



Dari grafik di atas, indikator sasaran meningkatnya kualitas perlindungan sosial kinerja yaitu capaian indikator persentase penurunan PMKS dan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat signifikan pada tahun 2023. Pada tahun 2023, penurunan PMKS adalah sebesar 13,75%, atau sebesar 275% dari target. Hal ini disebabkan optimalisasi aplikasi PDKTSAM dalam memverifikasi data kemiskinan di Kota Malang dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang, dari angka 7,66% pada tahun 2022 menjadi 6,80% pada tahun 2023.

Indikator sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan, yaitu indeks Pembangunan Manusia (IPMas) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 5**Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	26,37%	54%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP	75	80,05	80,10	80,70	81,8
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Maturitas SPIP	3,045	3,045	3,634	3,634	3,326
	Rasio PAD	0,3	0,25	0,28	0,34	0,34
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	66,61	67,06	74,68	76,32	88,51
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,85	3,7	2,73	2,6	3,82

Dari tabel diatas, kinerja indikator persentase perda yang ditegakkan dapat terjaga dengan baik. Sedangkan nilai SAKIP meningkat signifikan yang mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 dengan predikat A di angka 80,5 sampai 81,8. Opini BPK WTP bertahan setiap tahun, sedangkan maturitas SPIP ada di level 3. Untuk Maturitas SPIP tahun 2023 merupakan penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Rasio PAD juga terjaga pada 0,34 sampai tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Malang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerjanya. Kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN meningkat signifikan di tahun 2023 menjadi 88,5, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas manajemen ASN. Begitu pula dengan indikator Indeks Kematangan SPBE yang meningkat sangat signifikan sebesar 3,82 dari 2,6. Hal ini menunjukkan keberhasilan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Malang.



Sebagai bentuk informasi capaian indikator kinerja makro yang dituangkan dalam indikator tujuan daerah dan progres pencapaian kinerja 5 (lima) tahun periode RPJMD untuk menunjukkan *ultimate outcome/outcome finish* dari Kepala Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 6

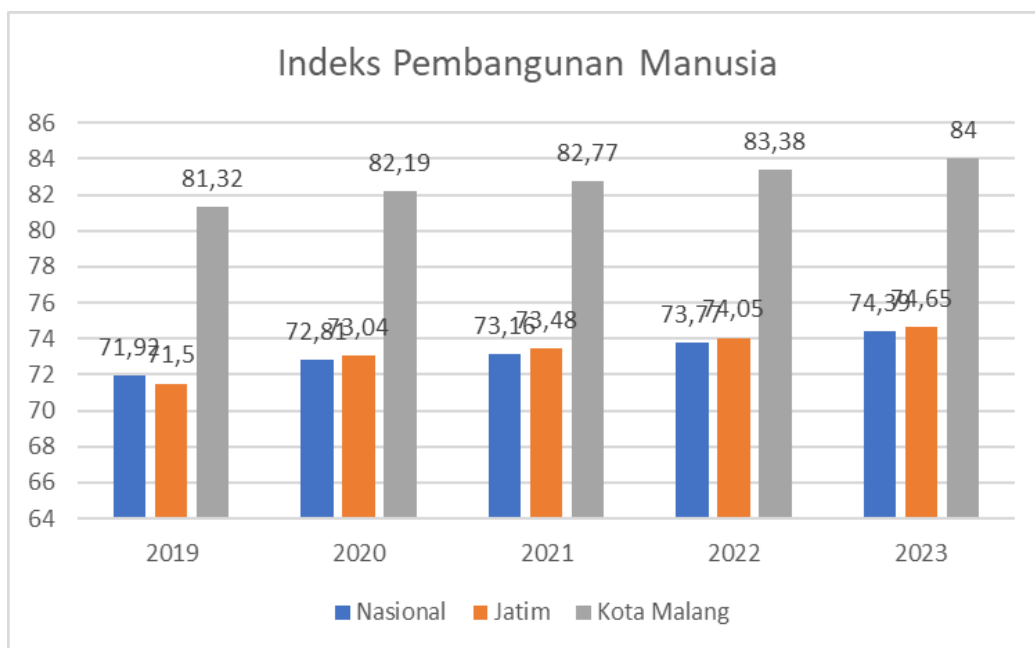
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan terhadap Target Tahun 2023

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi s.d. 2023	Capaian s.d. 2023
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,248	84	102,13%
Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,80%	6,07%	104,66%
	Gini Rasio	0,39	0,41	94,87%
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Angka Kemiskinan	3,77%	4,26%	87,00%
	Indeks Modal Sosial	90	83,65	92,94%
Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib Hukum, profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	73,51	77,89	105,96%

Sebagai profil kinerja Pemerintah Kota Malang maka perlu dibandingkan/*benchmarking* kinerja dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana grafik dibawah ini:

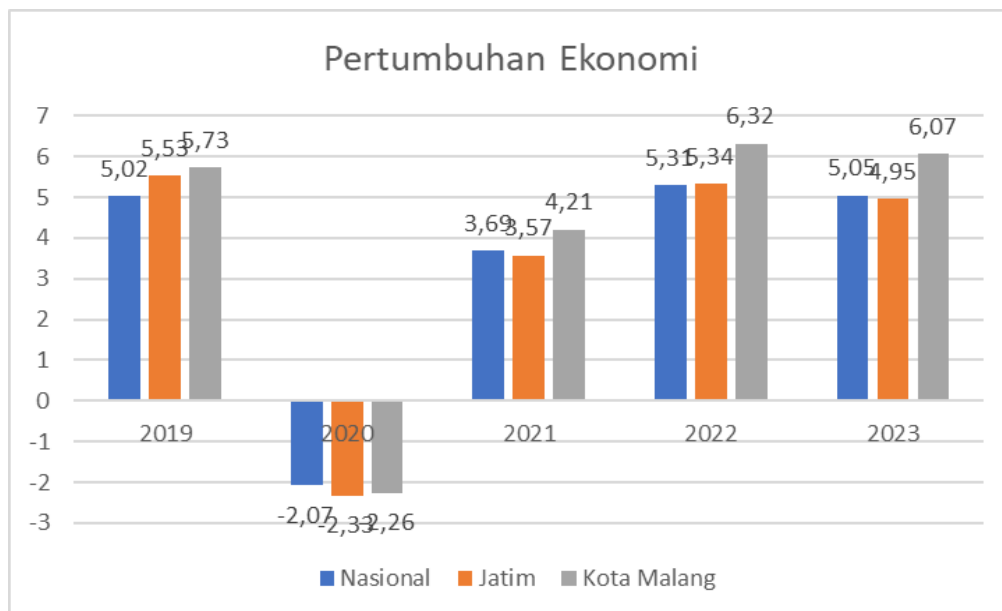


Grafik 5. Benchmark kinerja IPM Tahun 2019-2023

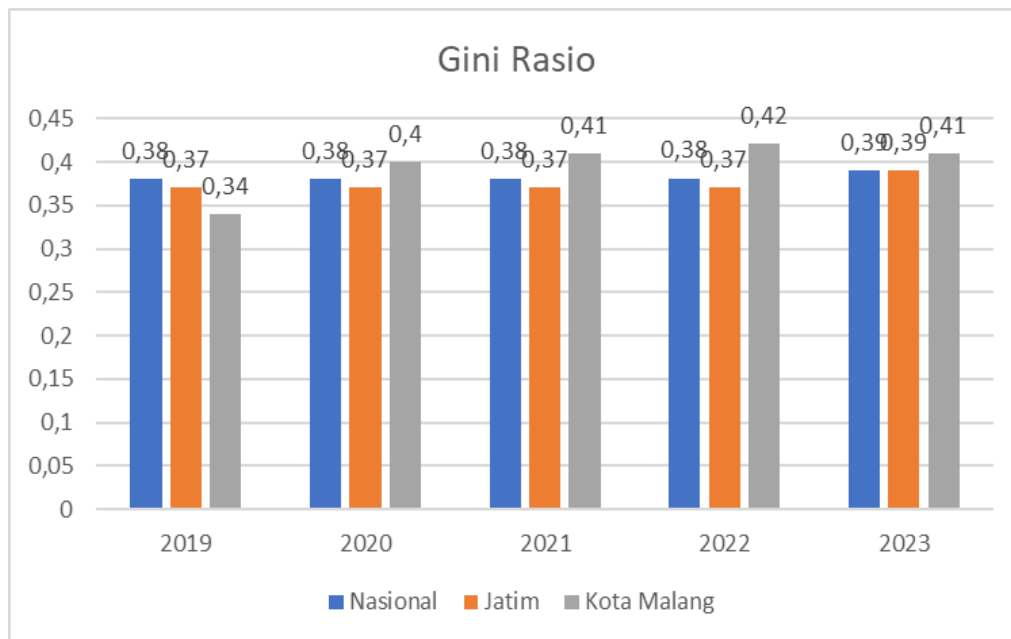


IPM tahun 2020 s.d. tahun 2023 menggunakan hasil SP2020 *Long Form*

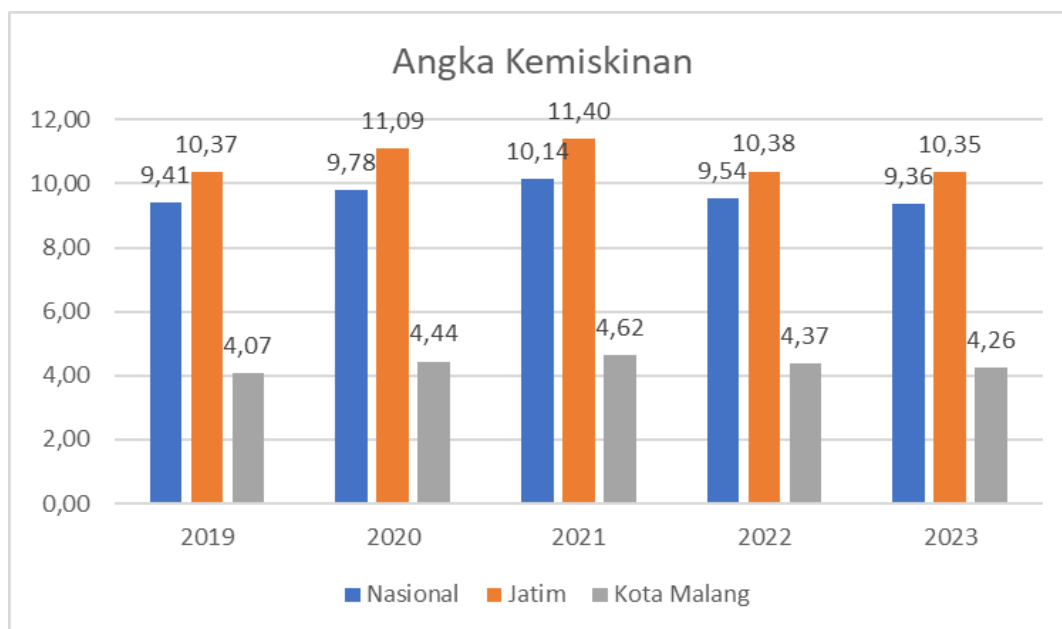
Grafik 6. Benchmark kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023



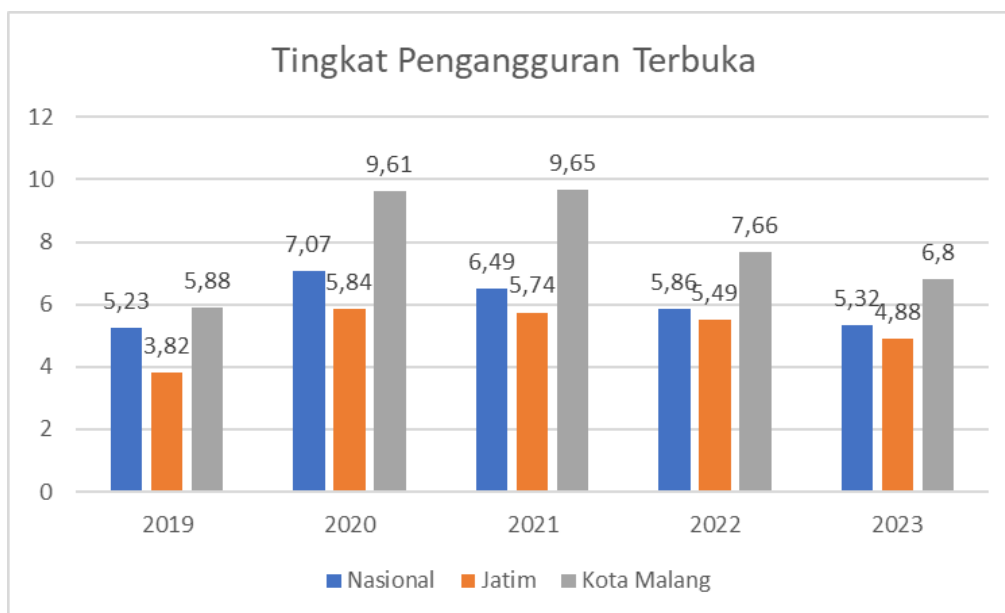
**Grafik 7. Benchmark kinerja Gini Rasio
Tahun 2019-2023**



**Grafik 8. Benchmark kinerja Angka Kemiskinan
Tahun 2019-2023**



Grafik 9. Benchmark kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023



Sebagian besar kinerja Pemerintah Kota Malang jika dibandingkan/*benchmark* kinerja dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional masih di atas rata-rata. Namun Gini rasio Kota Malang masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional dan Jawa Timur, walaupun terjadi penurunan dari angka tahun 2022. Pada tahun 2022 Gini Rasio Kota Malang sebesar 0,42 sedangkan tahun 2023 sebesar 0,41. Indikator makro ini menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh Kota Malang meskipun banyak variabel yang tidak bisa diintervensi secara langsung oleh Kota Malang termasuk dalam perhitungannya, di mana Kota Malang adalah kota strategis yang menjadi tempat perdagangan, pendidikan dan perputaran perekonomian sehingga mendapatkan bonus demografi dari daerah di sekitarnya dan menjadi objek dalam perhitungan kedua indikator dimaksud. Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang sudah menurun dibanding tahun 2022 meskipun masih lebih tinggi dibanding Nasional yang juga mengalami penurunan. Akan tetapi untuk periode RPJMD 2018 s.d 2023, dimana periode tersebut terjadi pandemik COVID-19 yang menyebabkan meningkatnya pengangguran dan angka kemiskinan. Kota Malang

dapat memperbaiki kondisi makro tersebut sehingga tidak meningkat di 2 (dua) tahun terakhir setelah pandemik.

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan target RPJMD tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	CAPAIAN
			2023	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,2	80	103,63%
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,3	85	103,28%
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,2	87	102,11%
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,45%	4,63%*	71,78%
5	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,50	4,51	100,222%
6	Meningkatnya kualitas kemanfaatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,63	59,92	88,60%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	CAPAIAN
			2023	2023	
1	2	3	4	5	6
	tata ruang dan lingkungan hidup	(IKLHD)			
7	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5,00%	13,75%	275%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,24%	6,80%	91,03%
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,9	0,8488	94,31%
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,20	95,54*	98,29%
9	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%	100%	100%
10	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	84,9	81,8	96,35%
		Opini BPK;	WTP	WTP	100%
		Maturitas SPIP	3,200	3,326	103,94%
		Rasio PAD.	0,33	0,34	103,03%
11	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	77,1	88,51	114,80%
12	Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,54	3,82	84,14%

d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan dengan Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi* (angka un audit)	Capaian (%)	
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,200	80,000	103,627%	269.838.305.077,00	261.446.369.658,86	96,89%	106,95%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,300	85	103,281%	348.813.584.910,00	331.956.434.630,07	95,17%	108,53%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,200	87	102,113%	14.757.763.642,00	14.257.925.798,00	96,61%	105,69%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,45%	4,63%	71,783%	71.434.807.454,00	67.092.103.862,00	93,92%	76,43%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,50	4,51	100,222%	486.961.033.927,00	459.277.739.467,00	94,31%	106,26%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,63	59,92	88,600%	54.309.962.258,00	52.851.369.223,00	97,31%	91,04%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi* (angka un audit)	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5,00%	13,75%	275,000%	39.229.454.391,00	24.821.046.492,00	63,27%	289,25%
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,24%	6,80%	91,03%				
	Rata-rata Capaian			183,01%				
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,9	0,8488	94,31%	169.605.992.226,00	166.108.666.097,00	97,94%	98,33 %
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,20	95,54	98,29%				
	Rata-rata Capaian			96,30%				
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%	100,00%	100,00%	9.638.765.667,00	4.450.466.568,00	46,17%	216,58%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP	84,9	81,8	96,35%	1.329.763.141.100,00	1.179.691.706.465,00	88,71%	113,66%
	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%				
	Maturitas SPIP	3,200	3,326	103,94%				
	Rasio PAD	0,33	0,34	103,03%				
	Rata-rata Capaian			100,829%				
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	77,1	88,51	114,80%	6.992.752.800,00	6.857.207.861,00	98,06%	117,07%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,54	3,82	84,14%	28.309.663.503,00	27.810.770.788,00	98,24%	85,65%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi* (angka un audit)	Capaian (%)	
	Rata-rata Capaian			107,68%	2.829.655.226.955,00	2.596.621.806.909,93	91,76%	117,34%

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui *cost per outcome* atau anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja *outcome* adalah sebesar **107,68%** dengan realisasi anggaran sebesar **91,76%**. Capaian kinerja tahun ini meningkat dibanding tahun lalu sebesar **101,52%**. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Malang sudah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja daerah.

e. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam kategori **Berhasil** dan **Sangat Berhasil** adalah pencapaian pada sasaran:

1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter, dengan indikator Indeks Pendidikan, di mana tercapai sebesar 80,00 dari target tahun 2023 yaitu 77,2 atau sebesar 103,63%. Variabel pembentuk indeks pendidikan yaitu angka Indeks Harapan Lama Sekolah sebesar 15,77, Indeks Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,94, dan Persentase Pelestarian Kebudayaan sebesar 97,60% juga mengalami kenaikan sehingga indeks pendidikan juga meningkat dan melampaui target;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan, dengan indikator Indeks Kesehatan, di mana tercapai sebesar 85 dari target tahun 2023 yaitu 82,3 atau sebesar 103,28%. Program-program yang mendukung capaian ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terutama dukungan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang merupakan upaya pemenuhan SPM urusan Kesehatan serta

peningkatan cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan (UHC). Angka usia harapan hidup juga meningkat menjadi 74,13 pada tahun 2023 sehingga indeks kesehatan meningkat. Akan tetapi dengan meningkatnya harapan hidup maka perlu diperhatikan penanganan lanjut usia dan rasio ketergantungan lansia;

3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan, dengan indikator Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity*, di mana tercapai sebesar 87 dari target tahun 2023 sebesar 85,2, atau sebesar 102,11%. Hal ini karena dukungan beberapa program di antaranya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), di mana tercapai sebesar 4,51 dari target tahun 2023 sebesar 4,50 atau sebesar 100,22%. Hal ini disebabkan dukungan beberapa program di antaranya Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Hampir semua indikator dapat tercapai dengan baik, namun perlu upaya perbaikan sendiri untuk mencapai target program yang belum mencapai target terutama pada rumah tidak layak huni. Kepuasan Layanan Infrastruktur meningkat karena fokus kita di tahun 2023 adalah perbaikan sarana prasarana infrastruktur sampai di tingkat wilayah kelurahan melalui usulan musrenbang



masyarakat.

5. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dengan indikator Persentase Penurunan PMKS, di mana tercapai sebesar 13,75% dari target tahun 2023 sebesar 275%. Hal ini karena optimalisasi PDKTSAM, di mana penduduk miskin bisa diverifikasi secara lebih baik sehingga penanggulangan kemiskinan bisa optimal dan tepat sasaran.
6. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum dengan indikator Persentase perda yang ditegakkan, di mana tercapai sebesar 100% dari target tahun 2023 sebesar 100% atau sebesar 100%. Hal ini tercapai dengan dukungan program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Target capaian program semua tercapai 100% dengan dukungan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Fasilitasi Bantuan Hukum;
7. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif dengan indikator Nilai SAKIP, Opini BPK, Maturitas SPIP dan Rasio PAD. Target rata-rata tercapai 100,829% melalui dukungan beberapa program diantaranya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh semua Perangkat Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan kecamatan, Program Penyelenggaraan Pengawasan serta pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan inspektorat, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dengan seluruh *stakeholder Hexahelix* yang dilakukan Bappeda dalam rangka kolaborasi/*cross cutting* menyelesaikan isu strategis daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah

dalam rangka menjaga keselarasan dan konsistensi perencanaan dengan penganggaran. Selain itu rasio PAD meningkat di tahun 2023 yaitu sebesar 0,34 dari target sebesar 0,33. Hal ini adalah upaya Kota Malang menuju kemandirian fiskal yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) melalui optimalisasi retribusi parkir menggunakan *e-parking*, peningkatan kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD dengan mengubah pengelolaan aset dari sistem izin pemakaian (IP) menjadi sewa dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

8. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN, di mana tercapai sebesar 88,51 dari target tahun 2023 sebesar 77,1 atau sebesar 114,80%. Target dapat tercapai melalui dukungan Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (terkait standar kompetensi yang ditetapkan).

Sedangkan pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang belum berhasil mencapai target adalah pada sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, dengan indikator Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, di mana pada tahun 2023 tercapai sebesar 4,63% dari target sebesar 6,45%, atau sebesar 71,78%.
2. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, di mana tercapai sebesar 59,92 dari target tahun 2023 sebesar 67,63 atau sebesar 88,60%. Ketidakberhasilan mencapai target di tahun ini disebabkan rendahnya indeks kualitas air yang hanya terealisasi 50,00 dengan target 58,00 dengan capaian 86,21%, dan indeks kualitas lahan dengan target 61,29 dan terealisasi 31,28 sehingga capaian 51,04%. Hal ini disebabkan Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kondisi hulu sungai yang dengan kondisi terjadi hujan lebat dimana membawa banyak material pencemar

yang terlarut di dalam arus sungai sehingga menyebabkan kualitas air sungai yg masuk ke wilayah Kota Malang menjadi keruh dan tercemar. Selain itu masih tingginya pencemaran sungai dari limbah pertanian dan peternakan yang belum memenuhi standar baku mutu. Beberapa kendala atau faktor yang menjadi permasalahan utama dan isu strategis dalam capaian IKL adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi Ruang Terbuka Hijau dalam perencanaan tata ruang;
 - b. Implementasi rencana kerja terkait RTH;
 - c. Pengawasan pengendalian tata guna lahan;
 - d. Penghargaan dalam program penghijauan;
 - e. Pelaksana program;
 - f. Partisipasi Masyarakat;
 - g. Pengaruh tokoh Masyarakat;
 - h. Keberadaan komunitas hijau;
 - i. Ketersediaan lahan;
 - j. Nilai lahan.
3. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka telah tercapai sebesar 6,80% dari target tahun 2023 sebesar 6,24% atau sebesar 91,03%.
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPMas) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPMas) telah tercapai sebesar 0,8488 dari target tahun 2023 sebesar 0,9 atau sebesar 94,31%. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah tercapai sebesar 95,54 dari target sebesar 97,20 atau sebesar 98,29%.
5. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi, dengan target indikator Indeks Kematangan SPBE di mana tercapai sebesar 3,82 dari target tahun 2023 sebesar 4,54 atau sebesar 84,14%. Meskipun belum mencapai target di angka 4,54 akan tetapi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja tahun 2023 melalui penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE yang sesuai



dengan Arsitektur SPBE Nasional dan selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional, dan memastikan penerapan SPBE dilakukan berdasarkan perencanaan SPBE yang telah disusun, telah membuahkan hasil dengan peningkatan yang sangat signifikan dari 2,6 di tahun 2022 menjadi 3,82 di tahun 2023.

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah:

1. Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian dan pengelolaan air limbah domestik, industri, rumah sakit, hotel dan perdagangan jasa sehingga kualitas air sungai menjadi lebih baik. Selain itu kondisi pemantauan kualitas air sungai seharusnya dapat menjadi dasar untuk ditingkatkan pengelolaan sungainya agar memenuhi standar baku mutu sehingga perlu dilakukan pemantauan rutin kualitas Air Sungai dan Udara Ambien secara berkala minimal 3 bulan sekali pada tiap tahunnya. Perlu menjadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai prioritas agar Indeks Kualitas Lahan mengalami peningkatan.
2. Upaya meningkatkan kematangan SPBE dengan memastikan penerapan SPBE dilakukan berdasarkan perencanaan SPBE yang telah disusun. Manajemen Risiko SPBE perlu disusun dan diterapkan agar program kegiatan yang terarah dan terencana, serta penyempurnaan pada setiap domain, aspek dan indikator SPBE yang perlu tindaklanjut sesuai rekomendasi.
3. Dalam rangka perbaikan kinerja, maka diperlukan perencanaan yang efektif menyelesaikan *gap* kinerja dan permasalahan aktual. Oleh karena itu pada penyusunan perencanaan tahun 2025 diupayakan perbaikan dengan melaksanakan forum lintas Perangkat Daerah bersama *stakeholder hexahelix* dengan *cross cutting* pada isu strategis yang terdapat di Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan **tematik cross cutting** arah kebijakan tahun kedua dan permasalahan aktual yaitu: Pengendalian Inflasi, Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Penurunan Stunting, Kemudahan Berusaha dan Transformasi Pelayanan Publik, serta Ekonomi Kreatif dan Penguatan Daya Saing Daerah.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum rata-rata capaian kinerja sasaran dalam kategori Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga, dan masyarakat. Semua upaya kolaborasi ini berhasil meningkatkan kinerja sangat signifikan yaitu dengan menurunnya angka kemiskinan dari 4,37 pada tahun 2022 menjadi 4,26% pada tahun 2023, dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 7,66% pada tahun 2022 menjadi 6,80% pada tahun 2023. Semua kinerja ini menunjukkan dampak pada semua sektor, baik perekonomian maupun kesejahteraan sosial.

Capaian kinerja makro/*ultimate outcome* yang meningkat signifikan ini selaras dengan capaian kinerja Kota Malang pada tahun 2022 sebesar 101,52% menjadi 107,68% pada tahun 2023. Berbagai inovasi telah dilakukan dalam mencapai percepatan kinerja, yaitu melalui peningkatan adaptasi digital, baik di sektor pendidikan, perdagangan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan perizinan, kesehatan, dan sebagainya.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga dapat diketahui langkah-langkah strategis dan upaya perbaikan yang dilaksanakan dalam mencapai target kinerja di tahun mendatang.





PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malang, 2 Januari 2023
WALIKOTA MALANG,
Drs. H. SUTIAJI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,20
2.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,30
3.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,20
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,45%
5	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,50
6.	Meningkatnya Kualitas Kemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	67,63
7.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	6,24%
		2. Persentase penurunan PMKS	5%
8.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,900
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,20
9.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%
10.	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	1. Nilai Sakip	84,90
		2. Opini BPK	WTP
		3. Maturutas SPIP	3,20
		4. Rasio PAD	0,33
11.	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	77,10
12.	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,54

No.	PROGRAM	PAGU
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.334.334.540.495,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	254.080.563.322,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	25.000.000,00
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	815.191.744,00

No.	PROGRAM	PAGU
5	Program Pengembangan Kebudayaan	535.651.160,00
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	450.005.000,00
7	Program Pembinaan Sejarah	15.000.000,00
8	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	152.680.000,00
9	Program Pengelolaan Permuseuman	1.757.599.072,00
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	213.216.129.366,00
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.186.839.000,00
12	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	834.934.000,00
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	9.345.460.700,00
14	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.583.350.000,00
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	763.470.000,00
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.787.712.046,00
17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	70.314.334.980,00
18	Program Pengembangan Permukiman	33.385.061.631,00
19	Program Penataan Bangunan Gedung	35.006.694.149,00
20	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	5.240.440.000,00
21	Program Penyelenggaraan Jalan	221.908.452.592,00
22	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.071.734.000,00
23	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	7.468.755.136,00
24	Program Pengembangan Perumahan	3.684.830.000,00
25	Program Kawasan Permukiman	705.110.000,00
26	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.443.139.712,00
27	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	15.019.710.399,00
28	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.859.583.756,00
29	Program Penanggulangan Bencana	2.896.398.401,00
30	Program Pemberdayaan Sosial	3.436.708.000,00
31	Program Rehabilitasi Sosial	17.377.867.900,00
32	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	16.963.122.300,00
33	Program Penanganan Bencana	254.520.000,00
34	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	271.772.924,00
35	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	561.068.000,00
36	Program Perlindungan Perempuan	436.710.000,00
37	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.302.474.000,00
38	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	99.000.000,00
39	Program Perlindungan Khusus Anak	1.130.660.412,00
40	Program Pengendalian Penduduk	406.600.000,00
41	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.687.268.000,00
42	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.652.800.000,00

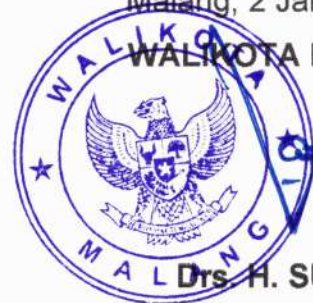
No.	PROGRAM	PAGU
43	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.221.334.525,00
44	Program Penempatan Tenaga Kerja	52.210.000,00
45	Program Hubungan Industrial	434.350.100,00
46	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	183.990.000,00
47	Program Promosi Penanaman Modal	748.990.000,00
48	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.179.015.080,00
49	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	772.665.000,00
50	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	277.680.558,00
51	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.266.735.800,00
52	Program Pengawasan Keamanan Pangan	113.304.000,00
53	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.639.579.000,00
54	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	569.312.000,00
55	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.177.759.500,00
56	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	787.346.000,00
57	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	636.188.000,00
58	Program Penyuluhan Pertanian	763.798.000,00
59	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.268.870.000,00
60	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.293.810.000,00
61	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	24.682.306.000,00
62	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	108.280.000,00
63	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	585.363.100,00
64	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	400.670.000,00
65	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	260.646.000,00
66	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	94.420.000,00
67	Program Pengelolaan Persampahan	19.473.483.800,00
68	Program Pendaftaran Penduduk	1.321.491.360,00
69	Program Pencatatan Sipil	1.531.410.480,00
70	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	330.183.460,00
71	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	60.500.000,00
72	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	20.724.458.430,00
73	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	7.101.293.436,00
74	Program Aplikasi Informatika	16.397.608.502,00
75	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	1.798.554.500,00
76	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	849.468.412,00

No.	PROGRAM	PAGU
77	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	140.322.450,00
78	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	195.785.412,00
79	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	499.255.000,00
80	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	959.967.000,00
81	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	4.655.593.787,00
82	Program Pengembangan UMKM	384.691.200,00
83	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	126.800.000,00
84	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	15.742.898.304,00
85	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	244.730.000,00
86	Program Pengembangan Ekspor	51.330.000,00
87	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	391.570.900,00
88	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	637.344.400,00
89	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	25.889.866.360,00
90	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	39.900.000,00
91	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100.000.000,00
92	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.035.761.628,00
93	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	18.969.876.100,00
94	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.000.000,00
95	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.722.479.000,00
96	Program Pemasaran Pariwisata	486.361.001,00
97	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	97.210.000,00
98	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.547.940.000,00
99	Program Pembinaan Perpustakaan	1.371.766.796,00
100	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	43.250.000,00
101	Program Pengelolaan Arsip	266.068.048,00
102	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	51.210.000,00
103	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	20.689.814.029,00
104	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.962.571.000,00
105	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	26.342.982.084,00
106	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.742.090.000,00
107	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.976.338.340,00
108	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.114.600.000,00
109	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	24.357.664.734,00
110	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.558.130.634,00
111	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.679.742.832,00
112	Program Kepegawaian Daerah	2.810.358.700,00
113	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.151.050.000,00
114	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.077.359.512,00

No.	PROGRAM	PAGU
115	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	537.991.000,00
116	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25.356.701.004,00
117	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	124.527.168.790,00
118	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.596.292.050,00
119	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	166.849.200,00
120	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	8.905.524.467,00
121	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	42.026.166.710,00
122	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	365.640.412,00
123	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	914.216.229,00
124	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.277.727.000,00

Malang, 2 Januari 2023

WALIKOTA MALANG,



Drs. H. SUTIAJI